

JUSTICE FOR THE POOR PELATIHAN PARALEGAL DAN MEDIATOR

1. Latar Belakang

Reformasi hukum merupakan prioritas utama dalam era transisi pemerintahan Indonesia. Di sisi lain hingga sekarang masih banyak lapisan masyarakat yang masih membutuhkan dukungan untuk memperoleh keadilan dan pemecahan persengketaan melalui prosedur yang manusiawi, tepat sasaran dan cepat. Sayangnya masyarakat miskin seringkali terpinggirkan dari hak-hak yang seharusnya mereka terima dan tidak memiliki akses keadilan. Mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hukum dan belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Kondisi inilah yang melatarbelakangi munculnya posko masyarakat hukum dan kader hukum desa atau paralegal serta para mediator merasa terpanggil untuk menjangkau keterbatasan hukum masyarakat miskin melalui pendampingan proses hukum, penguatan posisi tawar masyarakat dalam hal hukum dan hak mereka, penyadaran hukum anggota masyarakat mengenai isu-isu pidana dan perdata terutama sektor hukum perempuan, sumber daya alam, perburuhan, anti korupsi dan sebagainya.

Program RLA (Revitalization of Legal Aid) merupakan program peningkatan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan marjinal yang diprakarsai oleh lembaga Justice For the Poor dan World Bank. Dalam konteks ini Bina Swadaya mendapat kepercayaan merumuskan suatu program pelatihan bagi paralegal dan mediator posko desa dengan penekanan pada kegiatan peningkatan kesadaran dan pemahaman hukum untuk masyarakat kecil, peningkatan kapasitas posko masyarakat hukum, serta peningkatan kesadaran tentang isu-isu hukum masyarakat.

Program pelatihan paralegal dan mediator ini dilaksanakan sejak bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Januari 2010.

2. Tujuan

Tujuan program adalah: (1)meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum para penuduk miskin, (2)meningkatkan kapasitas posko masyarakat hukum dan (3) meningkatkan kesadaran tentang isu-isu hukum masyarakat.

3. Metodologi.

Program Pelatihan Paralegal dan Mediator dilaksanakan melalui kegiatan Training of Trainer (TOT) dan Pelatihan Paralegal termasuk di dalamnya pengembangan materi Pelatihan serta dilanjutkan dengan fasilitasi **serta monev**.

4. Lokasi dan Sasaran

Program RLA dilaksanakan di 3 provinsi yakni Lampung, Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Program ini terselenggara atas kerjasama Bina Swadaya dengan LSM lokal. Peserta pelatihan ialah staff pelaksana LSM lokal yang meliputi Project

Officers, Pengacara Masyarakat, Gender Specialist dan Fasilitator Posko. Jumlah peserta pelatihan adalah 21 orang, terdiri dari 5 perempuan dan 16 laki-laki.

5. Tahap-tahap Kegiatan

Tahap I: Pelatihan TOT untuk fasilitator di setiap provinsi

Tahap II: Pelatihan paralegal di setiap provinsi

Tahap III: Pelatihan Mediator di setiap provinsi

6. Output Program

Hasil-hasil kegiatan yang dicapai selama kurun waktu 12 bulan, adalah sebagai berikut:

- Tersusunnya modul pelatihan bagi pelatihan Paralegal dan Mediator
- Terselenggaranya kegiatan Training of Trainer fasilitator 1 kali, Paralegal dan Mediator bagi staf lembaga pelaksana secara paralel di 3 provinsi sebanyak 2 kali pelatihan dan jenis materi-materi yang diberikan meliputi isu hukum dan konteks lokal
- Peserta pelatihan mampu menyusun Rencana Kerja Tindaklanjut (RTL)
- Para peserta memberikan respon positif terhadap materi pelatihan

7. Peran Bina Swadaya Konsultan

Peranan Bina Swadaya Konsultan dalam program ini adalah menyusun modul pelatihan, memfasilitasi proses pelatihan dan mengevaluasi kinerja peserta pelatihan